

## **Distribusi Tenaga Kerja Sektor Pertanian pada Basis Agroekosistem Lahan Kering**

### ***Labor Distribution Sector of Agriculture in Dryland Agroecosystem Base***

**Sugiarto**

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian  
Jln. A.Yani 70 Bogor

#### **ABSTRACT**

*The research of labor forces in village has never been released to national development strategic. So that, the amount of labor forces absorption must be solved with opening job opportunity outside agriculture sector. This research gave information of labor force in agriculture sector and village on dry land basis. This research showed that job participation and unemployment level, nationally. Didn't change. In horticulture dry land basis, the role of agriculture sectors were still dominated job opportunity than outside agriculture. Nevertheless, household job opportunity in the village has a lot of variety and replaced the the role of job opportunity in agriculture sectors. In the other hand, work group of in agriculture sector was more dominated with lower education from down elementary school and it could not complete in labor force market outside agriculture sector. So, that, the role of agriculture sectors was still important to solve labor force problem in villages and still become a burden if it's not balanced with labor absorption in outside agriculture sector.*

*Keywords : Labor force, agriculture, dry land agroecosystem*

Diterima: 4-11-2010, disetujui: 30-02-2010

## **PENDAHULUAN**

Dinamika ekonomi di pedesaan yang merupakan bagian integral dari sistem perekonomian tidak lepas dari sistem perekonomian nasional secara keseluruhan. Berbagai perubahan terjadi mewarnai perkembangan sosial ekonomi pedesaan dan perkotaan sebagai akses strategi pembangunan, selama ini cenderung bersifat bias perkotaan, sehingga potensi perekonomian tidak dapat didayagunakan secara maksimal.

Di sisi lain, walaupun dilihat dari persentase penduduk miskin terjadi penurunan dari tahun ke tahun, tetapi secara absolut jumlah penduduk miskin masih sangat besar. Dari jumlah penduduk miskin sekitar 37 juta diperkirakan 24 juta diantaranya berada di wilayah pedesaan serta sekitar 55% bergantung pada sektor pertanian (BPS, 2008). Kondisi ini akibat dari

rendahnya pendapatan yang diterima dan rendahnya tingkat produktivitas, sehingga upah riil yang diterima juga rendah.

Menurut Adyana *et al.*, 2000; Nurmanaf *et al.*, 2004; dan Rusastra *et al.*, 2005, menyatakan bahwa di beberapa lokasi penelitian Patanas (Panel Petani Nasional) dengan basis tanaman pangan, pada lahan sawah (basah) dan lahan kering menunjukkan bahwa jenis pekerjaan sebagai petani dan buruh tani tidak lagi dominan seperti tahun 1988. Sementara itu, jenis pekerjaan di sektor luar pertanian telah menggeser peran sektor pertanian dengan ragam jenis pekerjaan dan kesempatan kerja. Struktur ketenagakerjaan di luar sektor pertanian yang memegang peranan dominan adalah sektor jasa yang dicirikan oleh besarnya kontribusi usaha informal sebagai salah satu pilihan untuk bertahan hidup (Simatupang dan Mardianto, 1996).

Di sektor pertanian dengan melalui program revitalisasi kesempatan kerja yang dilatarbelakangi fakta empiris membuktikan bahwa sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, ketenagakerjaan di sektor pertanian perlu dimaksimalkan karena pengaruh ketenagakerjaan terhadap produksi pertanian masih positif, walaupun ketersediaan tenaga kerja sangat terbatas, khususnya peran tenaga kerja muda yang kurang berminat untuk mengisi peluang di sektor pertanian. Di samping itu, dengan meningkatnya upah buruh pertanian menyebabkan petani yang mempunyai modal terbatas cenderung mengurangi penggunaan tenaga kerja upahan. Oleh karena itu, revitalisasi ketenagakerjaan di sektor pertanian perlu diimbangi dengan pengembangan agribisnis/agro-industri untuk memperluas kesempatan kerja di pedesaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek ketenagakerjaan dan potensi sumber tenaga kerja baik secara makro dan mikro di sektor pertanian dan pedesaan pada basis lahan kering, serta memberi masukan bagi penentu kebijakan tentang masalah ketenagakerjaan

## METODE

Penentuan lokasi didapat melalui sampling tipologi lahan dengan menggunakan dua variabel yaitu: tipe lahan pertanian dan jenis komoditas yang diusahakan petani. Penentuan basis lahan pertanian dan basis komoditas disetiap desa dilakukan dengan menggunakan LQ (*Location Quotient*) yang memiliki persamaan sebagai berikut:

$$LQ_{xk} = P_{xk}/P_{xp}$$

Keterangan,  $LQ_{xk}$  = Koefisien LQ jenis lahan x di desa k  
 $P_{xk}$  = pangsa luas jenis lahan x di desa k  
 $P_{xp}$  = Pangsa jenis lahan x di provinsi x

Desa yang memiliki koefisien LQ > 1 untuk jenis lahan x menunjukkan bahwa pada tingkat provinsi yang bersangkutan (provinsi p) struktur sumber daya lahan pertanian di desa tersebut relatif terkonsentrasi jenis lahan x. Mengingat tipologi desa yang dihasilkan mampu menggambarkan keragaman di tingkat nasional, maka perhitungan koefisien LQ sumber daya lahan juga dilakukan untuk tingkat nasional. Hal yang sama juga digunakan dalam mengidentifikasi basis komoditas pertanian, sebagai berikut:

$$LQ_{ik} = P_{ik}/P_{ip}$$

Keterangan,  $LQ_{ik}$  = Koefisien LQ jenis lahan i di desa k  
 $P_{ik}$  = Pangsa luas tanam komoditas i di desa k  
 $P_{ip}$  = Pangsa luas tanam komoditas i di provinsi x

Setelah LQ tipe desa dan LQ basis komoditas, maka dipilih lokasi desa berdasarkan kedua kombinasi LQ tersebut dan desa dengan nilai LQ yang tertinggi akan dipilih menjadi lokasi penelitian.

Selanjutnya untuk memilih lokasi desa yang akan ditetapkan sebagai wilayah sensus, maka dilakukan dengan memilih blok sensus representatif yang dapat mewakili desa tersebut. Jumlah responden yang terpilih antara 100 hingga 125 rumah tangga. Dari jumlah sensus terpilih 1.108 rumah tangga pada basis tanaman palawija dan 887 rumah tangga pada basis tanaman perkebunan (Tabel 1).

Tabel 1. Sebaran desa contoh rumah tangga pada basis agroekosistem lahan kering di pedesaan Patanas tahun 2008

Propinsi	Kabupaten	Desa	Komoditas Basis	Sensus
Lampung	Tulang Bawang	Catur Karya BJ	Ubikayu	110
Sulawesi Selatan	Bulukumba	Balleanging	Jagung	97
Jawa Timur	Blitar	Bumiayu	Jagung	151
Jawa Timur	Probolinggo	Resongo	Jagung	150
Jawa Tengah	Wonogiri	Ngelo	Kacang Tanah	152
Jawa Tengah	Pati	Tlogosari	Ubikayu	149
Jawa Barat	Garut	Mekarsari	Kacang Tanah	150
Jawa Barat	Garut	Sindangmekar	Kedelai	149
<b>Jumlah</b>				<b>1.108</b>
Jawa Timur	Malang	Bendosari	Sayuran	150
Jawa Barat	Bandung	Marga Mulya	Sayuran	152
Jawa Tengah	Boyolali	Karang Tengah	Sayuran	159
Sulawesi Selatan	Enrekang	Baroko	Sayuran	103
<b>Jumlah</b>				<b>565</b>
Jawa Timur	Malang		Tebu	151
	Lumajang		Tebu	151
Jambi	Batang Hari		Karet	100
	Muaro Jambi		Kelapa sawit	99
Sulawesi Selatan	Pinrang		Kakako	100
	Luwu		Kakao	102
Kalimantan Barat	Balai		Karet	103
	Parindu		Kelapa sawit	81
<b>Jumlah</b>				<b>887</b>

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu data primer diperoleh dari yang wawancara langsung dengan responden dalam bentuk kuesioner terstruktur, dan data sekunder

diperoleh dari hasil kompilasi di perpustakaan atau informasi instansi terkait. Analisis data, menggunakan analisis statistik deskriptif dengan tabulasi silang dan time series.

Selanjutnya, untuk mengukur permasalahan ketenagakerjaan diperlukan pendekatan konsep dan definisi yang mengacu pada Badan Pusat Statistik. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Definisi yang berkaitan dengan penerapan konsep tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut; Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan, namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak putus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu kegiatan ekonomi. Punya pekerjaan tetapi sedang tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya, termasuk mereka yang sudah diterima bekerja, tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.

Dalam beberapa hal mengenai konsep tenaga kerja menurut BPS, bahwa *persepsi angkatan kerja* adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan berstatus bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Sedangkan persepsi *partisipasi angkatan kerja* didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan seluruh penduduk, *tingkat partisipasi kerja* adalah sebagai rasio jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja, *kesempatan kerja* merupakan rasio jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan jumlah penduduk, dan *tingkat pengangguran* rasio jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dengan jumlah penduduk.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Keragaan Makro Ketenagakerjaan**

#### **Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja**

Jumlah penduduk berdasarkan usia kerja umur 15 tahun ke atas cenderung meningkat dengan laju pertumbuhan 1,9% per tahun atau meningkat dari 151.406 ribu jiwa pada tahun 2003 menjadi 166.641 ribu jiwa pada tahun 2008. Peningkatan tersebut diikuti dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja 3,1% per tahun atau meningkat dari 102.750 ribu jiwa pada tahun 2003 menjadi 119.472 ribu jiwa pada tahun 2008 dan perkembangan jumlah bukan angkatan kerja 2,4% per tahun.

Tingkat partisipasi dan jumlah pengangguran penduduk usia kerja di pedesaan dan perkotaan, tahun 2002-2008 disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2. Tingkat partisipasi dan jumlah pengangguran penduduk usia kerja kerja di pedesaan dan perkotaan tahun 2002-2008 (ribu jiwa)

Uraian	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Pert (%)
A. Jumlah Penduduk > 15 Th	151.406	153.924	158.491	160.812	164.118	166.641	1,9
1. Angkatan Kerja	102.750	103.973	105.858	106.389	109.041	119.472	3,1
a. Bekerja	92.810,8	93.722	93.958,4	95.457	99.930,2	102.553	2,0
b. Tidak bekerja	9.939,3	10.251,3	11.899,3	10.932	10.011,1	9.394,5	-0,7
2. Bukan Angkatan Kerja	48.656,2	49.950,3	52.633,7	54.423	54.176,9	54.694	2,4
a. Sekolah	11.481,7	11.577,2	13.581,9	13.530	13.777,4	13.226	3,1
b. Mengurus rumah tangga	29.727,2	30.877,3	30.619,5	31.978	31.989	32.771	2,0
c. lainnya	7.447,2	7.495,7	8.432,2	8.914,4	8.410,5	8.696,7	3,3
B. Tk Partisipasi Angkatan Kerja	67,8	67,5	66,79	66,16	66,99	67,18	
C. Tingkat Pengangguran	9,7	9,8	11,24	10,28	9,11	8,39	

Sumber : Keadaan tenaga kerja tahun 2003 -2008, BPS Jakarta

Akumulasi jumlah angkatan kerja secara nasional, bila dipisah antara jumlah angkatan kerja di pedesaan dan perkotaan, menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di perkotaan meningkat 2,3% per tahun (Tabel 3). Peningkatan tersebut diikuti dengan meningkatnya jumlah bukan angkatan kerja 0,7% per tahun. Hal ini membuktikan bahwa terjadi penurunan tingkat pengangguran yang semula pada tahun 2003 mencapai 12,5% turun menjadi 10,94% pada tahun 2008, akibatnya pertumbuhan ekonomi semakin baik karena mengalirnya arus tenaga kerja dari pedesaan ke perkotaan.

Tabel 3. Tingkat partisipasi dan jumlah pengangguran penduduk usia kerja kerja di perkotaan, tahun 2002-2008 (ribu jiwa)

Uraian	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Pert. (%)
A. Jumlah Penduduk >15 Th	6.7651	68.258,7	69.979,2	70.101	72.179,2	73.552	1,7
1. Angkatan Kerja	42.372,8	42.692,4	43.495,9	43.709	45.399,6	47.439	2,3
a. Bekerja	37.097	37.258,5	37.481,1	37.887	39.775,1	42.251	2,7
b. Tidak bekerja	5.275,7	5.433,9	6.214,8	5.822,3	5.624,5	5.187,6	0,0
2. Bukan Angkatan Kerja	25.278,2	25.566,3	26.283,3	26.392	26.779,6	26.123	0,7
a. Sekolah	7.271,2	7.045,7	7.777,3	8.160,2	7.991,2	7.345,6	0,4
b. Mengurus rumah tangga	14.292,3	14.875	14.686,9	14.526	14.994,2	14.945	0,9
c. lainnya	3.714,3	3.645,5	3.818,9	3.705,6	3.794,2	3.821,8	0,6
B. Tkt Partisipasi Angkatan Kerja	62,63	62,55	62,44	62,35	62,9	64,5	
C. Tingkat Pengangguran	12,5	12,73	14,22	13,32	12,39	10,94	

Sumber : Keadaan Tenaga Kerja Tahun 2003 -2008, BPS Jakarta

Laju pertumbuhan angkatan kerja meningkat 2,1% per tahun lebih tinggi daripada pertumbuhan secara nasional dan daerah perkotaan. Sementara itu, tingkat pengangguran dari tahun 2003 hingga tahun 2008 cenderung turun dari 7,7% hingga 6,52% yang diikuti dengan menurunnya angkatan kerja yang tidak bekerja 1,4% per tahun atau turun dari 4.663,5 ribu jiwa pada tahun 2003 menjadi 4.026,8 ribu jiwa pada tahun 2008. Hal ini membuktikan bahwa ada arus tenaga kerja di pedesaan telah mulai beralih keluar desa dengan cara urbanisasi ke pusat pertumbuhan ekonomi di perkotaan. Tingkat partisipasi dan jumlah pengangguran penduduk usia kerja kerja di pedesaan, tahun 2002-2008 disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Tingkat partisipasi dan jumlah pengangguran penduduk usia kerja kerja di pedesaan, tahun 2002-2008 (ribu jiwa)

Uraian	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Pert. (%)
A. Jumlah Penduduk > 15 Th	83.755,2	85.664	88.512,2	90.091	91.939	93.089	2,1
1. Angkatan Kerja	60.377,3	61.280,9	62.161,7	62.320	64.541,6	64.508	1,3
a. Bekerja	55.713,7	56.463,5	56.477,3	57.090	60.155	60.301	1,6
b. Tidak bekerja	4.663,5	4.817,4	5.684,4	5.229,7	4.386,6	4.206,8	-1,4
2. Bukan Angkatan Kerja	23.377,9	24.383,9	26.350,4	27.771	27.397,4	28.581	4,1
a. Sekolah	4.210,5	4.531,5	5.804,6	57.47,8	5.786,2	5.880,4	7,4
b. Mengurus rumah tangga	1.543,4	16.002,2	15.932,5	17.163	16.994,8	17.826	3,0
c. lainnya	3.732,9	3.850,2	4.613,3	4.800,5	4.616,4	4.874,9	5,8
B. Tkt Partisipasi Angkatan Kerja	72,09	71,4	70,2	69,17	70,2	69,3	
C. Tingkat Pengangguran	7,7	7,86	9,1	8,37	6,8	6,52	

Sumber : Keadaan tenaga kerja tahun 2003 -2008, BPS Jakarta

### Kesempatan Kerja Menurut Kelompok Umur

Secara umum pertumbuhan angkatan kerja di sektor pertanian cenderung mengalami penurunan 0,4% per tahun. Penurunan kesempatan kerja terutama pada kelompok umur 20-45 tahun (Tabel 5).

Tabel 5. Pertumbuhan kesempatan kerja pertanian menurut kelompok umur di Indonesia Tahun 2003-2008 (ribu jiwa)

Kelompok Umur	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Pert. (%)
15 -19	2.33,5	2.365,6	2.300,7	2.215,6	2.630,0	2.684,8	3,1
20 -24	3.987,8	3.581,7	3.753,3	3.754,9	3.708,6	3.628,5	-1,7
25 -29	4.777,1	4.323,0	4.501,0	4.315,4	4.295,6	4.229,5	-2,3
30 - 34	5.091,9	4.765,9	4.759,5	4.606,5	4.627,9	4.804,3	-1,1
35 -39	5.159,4	4.856,1	4.887,8	4.643,8	4.620,8	4.944,7	-0,7
40 - 44	5.016,5	4.858,3	4.750,4	4.525,6	4.628,2	4.803,2	-0,8
45 - 49	4.267,2	4.199,7	4.435,8	4.317,6	4.352,5	4.677,3	1,9
50 - 54	3.838,3	3.842,9	3.757,5	3.688,5	3.765,7	3.979,2	0,8
55 - 59	2.495,1	2.559,7	2.948,7	2.899,8	3.064,8	3.277,1	5,7
60 +	5.033,5	5.255,0	5.214,9	5.168,5	5.512,6	5.661,0	2,4
	42.001,4	40.608,0	41.309,8	40.136,2	41.206,5	42.689,6	0,4

Sumber : Keadaan tenaga kerja tahun 2003-2008. BPS, Jakarta.

Di lain pihak pertumbuhan kesempatan kerja pada usia 55-59 tahun mengalami peningkatan hingga 5,7% per tahun. Laju penurunan pertumbuhan kesempatan kerja bagi usia produktif 20 – 45 tahun akan memicu akumulasi tenaga kerja yang kurang produktif. Oleh karena itu, peran kesempatan kerja pada usia diatas 54 tahun merupakan salah satu penyebab rendahnya tingkat produktivitas di sektor pertanian dibandingkan di luar sektor nonpertanian. Upaya yang diperlukan untuk mengantisipasi hal tersebut yaitu diharapkan bahwa di sektor pertanian diisi oleh tenaga kerja yang produktif dan berpendidikan yang berpengalaman dan mempunyai *skill* serta ketrampilan yang tinggi.

### Kesempatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Pertumbuhan kesempatan kerja sektor pertanian menurut tingkat pendidikan di Indonesia 2003- 2008 disajikan pada tabel 6.

Tabel 6. Pertumbuhan kesempatan kerja sektor pertanian menurut tingkat pendidikan di Indonesia 2003-2008 (ribu jiwa)

Tingkat Pendidikan	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Pert. (%)
1. Tidak sekolah/belum sekolah	3.667,8	3.999,0	3.433,4	3.836,6	3.938,5	4.203,3	3,1
2. Tidak Tamat SD	8.128,4	8.187,5	7.647,3	7.702,8	8.288,6	8.088,3	-1,7
3. Tamat SD	20.151,7	19.052,6	20.217,5	19.021,9	19.319,5	19.946,2	-2,3
4. SLTP	7.375,0	6.932,1	7.367,5	6.704,7	6.603,5	6.664,6	-1,1
5. SLTA							
a. Umum	2.070,2	1.782,6	2.023,2	2.090,5	2.229,1	2.783,5	-0,8
b. Kejuruan	507,3	543,9	497,6	620,3	666,1	790,8	1,9
6. Diploma	47,8	53,3	57,4	64,3	99,9	111,6	0,8
7. Perguruan Tinggi	53,3	57,1	66,9	95,1	61,4	101,2	5,7
Total	42.001,4	40.608,0	41.310,8	40.136,2	41.206,6	42.689,4	2,4

Sumber : Keadaan tenaga kerja tahun 2003-2008. BPS, Jakarta.

Pada Tabel 6, memperlihatkan bahwa pertumbuhan kesempatan kerja di sektor pertanian yang berpendidikan SLTP ke bawah cenderung menurun, terutama tingkat pendidikan tamat SD yang turun 2,3% per tahun dan tidak tamatan SD 1,7% per tahun. Sementara itu, pertumbuhan kesempatan kerja bagi yang berpendidikan SLTA keatas mengalami peningkatan yang cukup berarti. Terutama peningkatan kesempatan kerja yang berpendidikan tinggi yang meningkat 5,7% per tahun yang dapat diharapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian.

### Kesempatan kerja menurut Status Pekerjaan

Pertumbuhan kesempatan kerja menurut status pekerjaan dari tahun 2003 hingga 2008 yang perkembangannya lebih dominan pada status berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain dan pekerja bebas di pertanian yang masing-masing meningkat 5,4% dan 6,5% per tahun (Tabel 7).

Tabel 7. Pertumbuhan kesempatan kerja menurut status pekerjaan di pertanian tahun 2003–2008 (ribu jiwa)

Status Pekerjaan	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Pert. (%)
Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain	4.027,6	4.315,7	3.817,7	4.779,7	4.912,2	5.089,8	5,4
2. Berusaha dengan dibantu ART	16.427,5	15.644,3	15.495,8	14.442,9	14.339,6	14.861,7	-1,9
3. Berusaha dengan buruh tetap	1.033,0	1.019,6	1.113,7	906,4	792,6	817,7	-4,0
4. Pekerja buruh	2.100,4	2.102,5	2.117,7	2.323,1	2.373,9	2.593,7	4,4
5. Pekerja bebas di Pertanian	4.555,2	4.449,9	5.534,8	5.541,2	5.917,4	6.130,5	6,5
6. Pekerja tidak dibayar	13.857,8	13.075,9	13.110,5	12.143,0	12.670,9	13.196,3	-0,9
Total	42.001,4	40.608,0	41.190,2	40.136,2	41.006,5	42.689,6	0,4

Sumber : Keadaan tenaga kerja tahun 2003-2008. BPS, Jakarta.

Sementara itu, tenaga kerja dengan status pekerjaan dibantu anggota rumah tangga dan berusaha dengan buruh tetap pertumbuhannya cenderung menurun. Hal ini membuktikan bahwa kesempatan kerja di sektor pertanian mempunyai potensi sumber daya yang cukup untuk dibudidayakan melalui skala usaha yang diupayakan oleh kemampuan usaha mandiri atau dibantu dengan anggota keluarga dan teknologi. Di lain pihak, meningkatnya pekerja buruh di sektor pertanian dapat membawa dilema bagi sektor pertanian yang selama ini menjadi beban di dalam meningkatkan produktivitas.

### **Ketenagakerjaan pada basis komoditas tanaman semusim dan tahunan Partisipasi Angkatan kerja**

Ketenagakerjaan di lahan kering adalah kesempatan tenaga kerja yang ada pada lahan kering dengan komoditas yang dominan di daerah tersebut.

Tabel 7. Jumlah anggota rumah tangga, angkatan kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja pada basis komoditas di lahan kering pedesaan Patanas tahun 2008

Basis Komoditas	Jumlah Penduduk	Angkatan Kerja			Bukan Angkt. Kerja	Tingkat Partisipasi			Pengangguran
		Bekerja	Tidak Bekerja	Jumlah		Part. Kerja	Kesemp. Kerja	Angkt. Kerja	
<b>1. Tanaman Semusim</b>									
a. Palawija	4.362,0	2.661	579	3.240	1.122	82,1	61	74,3	13,3
b. Sayuran	2.369	1.373	346	1.719	650	79,9	58	72,6	14,6
Total	6.731,0	4.034	925	4.959	1.139	81,3	59,9	73,7	13,7
<b>Tanaman Tahunan /Perkebunan</b>									
a. Tebu	1.061	652	181	833	228	78,3	61,5	78,5	17,1
b. Karet	825	448	153	601	224	74,5	54,3	72,8	18,5
c. Kakao	1.074	401	242	643	357	62,4	37,3	59,9	22,5
d. Kelapa Sawit	638	325	118	443	195	73,4	50,9	69,4	18,5
Total	3.598	1.826	694	2.776	1.004	65,8	50,8	77,2	19,3

Sumber : Data primer 2008

Pada Tabel 7, dengan mengelompokkan angkatan kerja menurut basis komoditas di lahan kering menunjukkan bahwa tingkat partisipasi kerja pada basis tanaman semusim 81,3% lebih besar dibandingkan dengan partisipasi pada basis tanaman perkebunan 65,8%. Sementara itu, peluang kesempatan kerja pada basis tanaman perkebunan lebih kecil (50,8%) dibandingkan pada basis tanaman semusim (59,9%). Hal ini menyebabkan tingginya angka pengangguran tenaga kerja pada basis tanaman perkebunan (19,3%) dibandingkan dengan tenaga kerja pada basis tanaman semusim (13,7%), dan masih diatas rata-rata pengangguran secara nasional. Secara berturut-turut daerah basis komoditas dengan tingkat pengangguran yang tinggi adalah basis komoditas kakao (22,5%), kemudian basis kelapa sawit dan karet masing-masing 18,5%. Ada beberapa hal yang memengaruhi tingkat partisipasi kerja dan tingkat pengangguran yaitu; 1) Tingginya tingkat aksesibilitas desa terhadap sumber pertumbuhan ekonomi, 2) Peranan sarana, prasarana, dan transportasi yang mudah menjangkau berbagai sumber mata pencaharian di pertanian dan nonpertanian, 3) Akses penguasaan dan garapan lahan yang marginal yang mendorong untuk melakukan diversifikasi berbagai sumber mata pencaharian, 4) Tingkat



pengetahuan, pendidikan, dan wawasan yang dimiliki digunakan untuk memilih jenis pekerjaan yang lebih sesuai, serta 5) Adanya pemutusan hubungan kerja yang kembali ke desa yang akhirnya dapat memengaruhi keseimbangan pasar tenaga kerja di pedesaan (Rusastra *et al.*, 2005)

### Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja

Salah satu indikator kualitas tenaga kerja di dalam mengisi peluang kesempatan kerja adalah tingkat pendidikan, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki. Dengan bekal tersebut, dapat meningkatkan daya saing permintaan sesuai dengan peluang kesempatan kerja yang diinginkan. Jenjang pendidikan yang terendah dan tingkat pengetahuan yang kurang merupakan kendala yang menghambat pembangunan pertanian. Salah satu diantaranya adalah kualifikasi tamatan SD yang sederajat (0–6 tahun) dan mengakumulasi jumlahnya di sektor pertanian dan pedesaan yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Kondisi ini sesuai dengan hasil penelitian secara mikro di desa Patanas, antara lain Nurmanaf *et al.*, (2004), Bambang Irawan, *et al.*, (2007) dan Reni Kustiari *et al.*, (2008) memperlihatkan bahwa pada agroekosistem lahan sawah irigasi dan lahan kering proporsi tenaga kerja yang terserap di pertanian ada 60% yang tamatan SD ke bawah yang perlu ditingkatkan kualitasnya melalui berbagai jenis pendidikan dan pelatihan.

Jumlah angkatan kerja pertanian menurut tingkat pendidikan pada basis komoditas di tanaman semusim dan tahunan pada lahan kering Pedesaan Patanas tahun 2008 disajikan pada tabel 8.

Tabel 8. Jumlah angkatan kerja pertanian menurut tingkat pendidikan pada basis komoditas di tanaman semusim dan tahunan di lahan kering Pedesaan Patanas tahun 2008

Basis Komoditas	Kelompok Lama Pendidikan				Total
	0 - 6 Th	7 - 9 Th	9 - 12 Th	> 12 Th	
A. Tanaman Semusim					
a. Tanaman Palawija	82	12	5,5	0,5	100
b. Tanaman Sayuran	70,5	17	11	1,5	100
Total	<b>78,1</b>	<b>13,7</b>	<b>7,4</b>	<b>0,8</b>	<b>100</b>
B. Tanaman Perkebunan					
a. Karet	69,4	18,5	11,1	1	100
b. Kakao	76,9	10,5	10,9	1,7	100
c. Kelapa Sawit	43,3	29,6	25,4	1,7	100
d. Tebu	84,1	9,1	6,4	0,4	100
Total	<b>70,7</b>	<b>15,9</b>	<b>12,3</b>	<b>1,1</b>	<b>100</b>

Sumber : Data primer 2008

Pada Tabel 8, memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di pedesaan pada kedua basis komoditas tanaman semusim dan tanaman tahunan/perkebunan yang berpendidikan SD kebawah tidak jauh berkisar di atas 70% angkatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa program pendidikan di pedesaan lahan kering masih perlu ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga tidak menjadi beban yang berat bagi sektor pertanian yang dipenuhi oleh angkatan kerja yang berpendidikan rendah.

Sementara itu, bila dilihat secara parsial, pada basis komoditas tanaman semusim, jumlah angkatan kerja yang berpendidikan SD ke bawah yang tertinggi terdapat pada basis tanaman sayuran (82%) dan basis tanaman tahunan tebu lahan (84,1%). Sedangkan untuk angkatan kerja

berpendidikan 7 hingga 9 tahun yang tertinggi terdapat pada basis tanaman kelapa sawit, demikian halnya dengan yang berpendidikan 10 hingga 12 tahun yang tertinggi terdapat pada basis tanaman sayuran dan kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran angkatan kerja pada basis komoditas tersebut lebih tinggi daripada basis yang lain dan mampu memanfaatkan kesempatan, fasilitas serta sarana pendidikan yang tersedia di daerahnya.

### **Penerapan Angkatan kerja menurut kelompok umur**

Jumlah angkatan kerja pertanian menurut kelompok umur pada basis komoditas di tanaman semusim dan tahunan di lahan kering pedesaan Patanas disajikan pada tabel 9.

Tabel 9. Jumlah angkatan kerja pertanian menurut kelompok umur pada basis komoditas di tanaman semusim dan tahunan di lahan kering pedesaan Patanas di 2008.

Basis Komoditas/ Kabupaten	Kelompok Umur (Tahun)					Total
	15- 24	25-34	35-44	45-54	> 55	
<b>A. Tanaman Semusim</b>						
1. Palawija	10,8	21	26,5	21,2	20,5	100
2. Sayuran	15,5	26	20	19,9	18,5	100
Total	12,5	22,8	24,2	20,7	19,8	100
<b>B. Perkebunan</b>						
a. Karet	17,5	26,8	26,3	19	10,4	100
b. Kakao	13,4	25,4	31,6	18,9	10,7	100
c. Kelapa sawit	13,4	25,4	31,6	18,9	10,7	100
d. Tebu	11,1	19,5	27	22,7	19,7	100
Total	15,6	23,3	26,9	19,7	14,5	100

Sumber : Data primer 2008

Pada Tabel 9, dengan mengelompokkan angkatan kerja menurut rangking umur sepuluh tahunan yang bekerja di sektor pertanian, secara agregat mengelompok pada usia di bawah 45 tahun yang berkisar 60% pada basis tanaman sayuran dan 65% pada basis tanaman perkebunan. Sementara itu, potensi angkatan kerja pada kelompok usia kerja 15 tahun hingga 24 tahun berjumlah 12,5% pada basis tanaman sayuran dan 15% pada basis tanaman perkebunan sebagai tenaga muda yang cukup potensial untuk menggantikan tenaga kerja pada kelompok usia kerja di atas usia kerja 55 tahun (14-19,8%) yang dianggap sudah tidak produktif lagi. Namun demikian, pada kenyataannya kelompok tenaga muda kurang tertarik bekerja di sektor pertanian karena beberapa hal, antara lain: a) Terbatasnya kesempatan kerja pertanian bagi yang berpendidikan tinggi; b) Sektor pertanian umumnya tidak mendatangkan pendapatan dalam waktu singkat; c) Usaha pertanian mengandung banyak resiko, d) pendapatan di sektor pertanian lebih rendah dari yang diharapkan dan, e) Kurang status sosial dan kenyamanan kerja, karena kesan usaha pertanian yang kumuh

Beberapa kebijakan strategis untuk mendorong minat tenaga kerja produktif ke sektor pertanian adalah: 1) Mendorong pengembangan agroindustri sehingga meningkatkan nilai tambah dan produktivitas tenaga kerja pertanian, 2) Meningkatkan intensitas pemanfaatan teknologi dan mekanisasi pertanian, sehingga meningkatkan citra pertanian dan minat generasi muda untuk mengembangkan sektor pertanian, 3) Pengembangan fasilitas peningkatan kemampuan manajemen dan kewirausahaan SDM, sehingga mampu mengelola usaha secara efisien, produktif, dan kompetitif, serta 4) Meningkatkan skala usaha pertanian yang mampu mendukung kesejahteraan pengelolaannya agar setara dengan sektor nonpertanian.

### Angkatan Kerja Menurut Sumber Mata Pencaharian

Secara umum sumber mata pencaharian angkatan kerja di pedesaan tidak bergantung pada satu sumber mata pencaharian saja, mereka melakukan beberapa kegiatan yang bersumber di sektor pertanian maupun nonpertanian. Namun demikian sumber mata pencaharian yang memerlukan waktu yang lebih banyak, biasanya dianggap sebagai sumber mata pencaharian utama dan merupakan pendapatan yang terbesar. Kemudian, apabila ada sisa waktu pada kegiatan utama, akan dialokasikan pada sumber mata pencaharian yang kedua atau ketiga sebagai kegiatan sampingan.

Persentase angkatan kerja yang bekerja menurut jenis pekerjaan pada basis komoditas di tanaman semusim dan tahunan di lahan kering pedesaan Patanas disajikan pada tabel 10.

Tabel 10. Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan pada basis komoditas di tanaman semusim dan tahunan di lahan kering Pedesaan Patanas, 2008.

Basis Komoditas/ Desa	Sumber Mata Pencaharian (%)								
	Usaha Pertanian	Buruh Pertanian	Buruh Industri	Dagang	Pekerja Bangunan	Pekerja Jasa	Usaha Industri	Ang kutan	Peg/tata laksana
1. Tan. Semusim									
a. Tan. Palawija	65	10,5	3,2	5,3	3,9	5,5	1,7	1,3	3,7
b. Tan. Sayuran	65,8	14,6	1	6,3	1,2	1,9	0,7	2,9	5,7
Total	65,2	12,2	2,2	5,6	2,9	4,3	1,3	1,8	4,4
2. Tan. Perkebunan									
a. Karet	77,5	10,7	1,1	2	1,1	1,1	2,9	1,1	2,5
b. Kakao	53,2	8,9	0	7,6	2,3	1,5	5,5	7,2	13,9
c. Kelapa Sawit	69,5	17,7	0,9	0	0,6	2,1	3	2,4	3,9
d. Tebu	49,5	26,7	1,1	0,6	2,5	3,2	6,4	7,4	2,6
Total	60,5	16,9	0,8	2,6	1,8	2,1	4,8	5	5,6

Sumber : Data primer 2008

Pada Tabel 10, menunjukkan bahwa desa-desa berbasis tanaman semusim lebih dominan oleh jumlah angkatan kerja yang sumber mata pencahariannya di sektor pertanian (65,2%) dibandingkan dengan desa yang berbasis tanaman palawija (60,5%). Sementara itu, jumlah sumber mata pencarian di sektor pertanian pada basis tanaman semusim lebih dominan daripada sumber mata pencaharian nonpertanian. Akan tetapi, pada basis tanaman perkebunan, terutama basis tanaman kakao dan tebu lebih terdiversifikasi ke berbagai jenis sumber mata pencaharian sumber mata pencaharian sebagai pedagang, usaha industri, dan usaha angkutan. Besarnya jumlah sektor nonpertanian sebagai sumber mata pencarian, disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: a) aksesibilitas daerah yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, b) terbukanya peluang kesempatan kerja di sektor non pertanian, c) kegiatan usaha pertanian yang semakin terbatas, d) berkembangnya industri dan jasa dan e) kegiatan usaha pertanian kurang menarik bagi tenaga kerja muda dan bagi yang berpendidikan tinggi.

### Angkatan Kerja Menurut Status Pekerjaan.

Persentase angkatan kerja yang bekerja menurut status di pedesaan patanas tahun 2008 pada basis komoditas di tanaman semusim dan tahunan di lahan kering pedesaan Patanas disajikan pada tabel 11.

Tabel 11. Jumlah persentase angkatan kerja yang bekerja menurut status di pedesaan patanas, 2008 pada basis komoditas di tanaman semusim dan tahunan di lahan kering pedesaan Patanas tahun 2008

Agroekosistem/ Basis Komoditas	Status Pekerjaan					
	Usaha + Buruh Upahan	Usaha dg TK dalam Keluarga	Usaha Sendiri	Tk bukan Upahan	Buruh Upahan	Campuran
1. Tanaman Semusim						
a. Tanaman Palawija	2,6	20,1	7,6	35	24,7	10
b. Tanaman Sayuran	1,7	13	7,9	39,7	24,3	13,4
Total	2,3	17,6	7,7	36,7	24,5	11,2
2. Tanaman Perkebunan						
a. Tebu	4,4	7,2	7,1	21,9	42,2	17,2
b. Karet	4,2	37,5	5,4	34,2	17	1,8
c. Kakao	6,5	15	5,5	24,3	41,6	7,2
d. Kelapa Sawit	4,5	16,2	6,9	27,2	20,7	24,6
Total	4,9	17,8	6,2	26,3	32,3	12,4

Sumber : Data primer 2008

Pada Tabel 11, memperlihatkan bahwa pengelompokan angkatan kerja yang bekerja berdasarkan status pekerjaan di pedesaan yang terbesar berturut-turut adalah angkatan kerja yang bekerja sebagai buruh upahan (32,3%) pada basis tanaman perkebunan dan angkatan kerja yang bekerja menggunakan tenaga kerja bukan upahan (36,7%) pada basis tanaman sayuran. Kegiatan usaha dengan status pekerjaan sebagai tenaga kerja keluarga dan sebagai buruh upahan, hal ini terjadi karena ketersediaan tenaga kerja di luar keluarga yang terbatas, sehingga ketersediaan tenaga kerja di dalam keluarga dimanfaatkan untuk kegiatan produktif membantu keluarganya dan bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Pada kelompok status pekerjaan sebagai buruh tidak dibayar umumnya adalah tenaga kerja keluarga yang membantu kegiatan usaha rumah tangga. Sedangkan status tenaga kerja sebagai buruh upahan adalah mereka yang memerlukan insentif dalam bentuk upah kerja, serta ketersediaannya merupakan potensi tenaga kerja yang kurang mampu bersaing di pasar tenaga kerja dengan kepemilikan lahan sempit (*landless*) atau tidak memiliki lahan (*tuna kisma*). Konsekuensinya di sektor pertanian yang berorientasi di pedesaan dengan adanya kedua status pekerjaan tersebut akan menjadi beban yang berat, bila tidak diimbangi penyerapan tenaga kerja di luar sektor pertanian. Lebih lanjut pada Tabel 11, status pekerjaan yang dominan, seperti status pekerjaan sebagai buruh upahan yang terbesar berturut-turut pada basis tanaman tebu (42,2%), dan tanaman kakao (41,6%). Sedangkan status tenaga kerja tidak diupahkan yang terbesar pada basis tanaman palawija (35%) dan basis tanaman sayuran (39%).

## KESIMPULAN

Secara nasional, pertumbuhan kesempatan kerja dari tahun 2003-2008 berjalan sangat lambat dan tingkat partisipasi kerja dan kesempatan kerja yang mengalami stagnan tidak jauh

berbeda pada tahun sebelumnya. Sementara itu, perkembangan tingkat pengangguran mengalami fluktuasi yang menurun dari tahun 2005 hingga tahun 11,24% turun menjadi 8,39% tahun 2008.

Pertumbuhan kesempatan kerja di sektor pertanian pada usia produktif pada periode 2003-2008 mengalami pertumbuhan yang menurun, akibat dari pola pergiliran masuknya angkatan kerja usia muda yang beralih ke sektor nonpertanian. Namun demikian, terjadi penurunan pertumbuhan tamatan SD ke bawah, sedangkan pendidikan SLTP dan SLTA meningkat.

Di tingkat pedesaan, partisipasi angkatan kerja rumah tangga yang relatif besar jumlahnya, belum diimbangi dengan rendahnya tingkat pengangguran. Sementara itu, partisipasi tingkat pendidikan angkatan kerja di pedesaan penelitian didominasi oleh tingkat pendidikan tamatan SD ke bawah. Namun demikian beberapa desa tertentu seperti pada basis tanaman kelapa sawit dan sayuran, sudah berorientasi pada pendidikan tamatan SMP hingga SMU lebih besar dibanding pada basis komoditas lainnya.

Tingkat partisipasi angkatan kerja rumah tangga yang bekerja di pedesaan didominasi oleh mereka yang bekerja di sektor pertanian dibanding di luar sektor pertanian. Jenis pekerjaan di sektor pertanian yang utama adalah mereka yang bekerja pada bidang produksi hasil pertanian dibandingkan bidang pasca panen dan pemasaran hasil pertanian. Sedangkan jenis pekerjaan yang dominan adalah pekerja sebagai jasa atau perdagangan.

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di pedesaan yang berorientasi pada pembangunan pertanian, melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang didukung dengan pembinaan, penyuluhan dan penguatan permodalan. Disamping itu, perlu pengembangan agribisnis atau agroindustri yang berbasis pada sumber daya alam setempat yang dapat diharapkan mampu menyerap tenaga kerja di dalam desa dan bersaing di pasar tenaga kerja

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adnyana. M. O., Sumaryanto, M. Rachmat., R. Kustiari., S. H. Susilowati, Supriyati, E. Suryani, Suprpto. 2000. *Assesing The Rural Development Impact of The Crisis In Indonesia*. CASER. Bogor, Indonesia
- Biro Pusat Statistik. *Survei Angkatan Kerja Nasional, Berbagai Tahun (2003-2008)*.
- Dewa, K.S.. 2000. *Dinamika Pasar tenaga Kerja Struktur Upah dan Harga di Pedesaan*. Makalah disajikan pada seminar rutin Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Irawan B., Pantjar S., Reni K., Sugiarto, Supadi, Yulia F. S., Muhamad I., Mewa A., Valeriana D., Rosganda E., Sunarsih, Chaerul M., Tri B. P., dan Tjetjep N. 2007. *Panel Petani Nasional (PATANAS) Analisi Indikator Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Analisis dan Kebijakan Pertanian. Bogor
- Kustiari, R., P. U, Hadi, Sugiarto, Adreng Purwoto, Supadi, M. Ariani, Sunarsih, Y. F Sinuraya, Deri H., M. Maulana, T. B. Purwantini, Bambang W., dan Waluyo. 2008. *Panel Petani Nasional (PATANAS) Analisi Indikator Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Analisis dan Kebijakan Pertanian. Bogor

- Nurmanaf. A. R., A. Djulin., Sugiarto., Herman S., Supadi., N. K. Agustina., J.F. Sinuraya dan Gelar.S.B. 2004. *Dinamika Sosial Ekonomi Rumah tangga dan Masyarakat Pedesaan: Analisa Profitabilitas Usahatani Dan Dinamika Harga dan Upah Pertanian*. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Rusastra, I. W., Khairina. M. N., Supriyati, Erma S., Mohamad S., dan Rosganda E. 2005. *Analisis Ekonomi Ketenagakerjaan Sektor Pertanian dan Pedesaan di Indonesia*. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembanagn Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Simatupang, P. dan S. Mardianto.1996. *Pengaruh Kebijakan Moneter dan Kurs Valuta Asing Terhadap Transformasi Struktur Perekonomian di Indonesia*. Prosiding